

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Politik luar negeri bebas aktif pertama kali dicetuskan oleh Moh. Hatta pada tanggal 2 September 1948 di depan kelompok kerja KNIP. Dalam pidatonya Hatta mengemukakan bahwa Indonesia tidak perlu memilih pro-Amerika atau pro-Soviet, sehingga Indonesia tidak menjadi objek dalam perjuangan politik internasional. Indonesia harus menjadi subjek yang memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri. Selanjutnya pada tanggal 16 September 1948, Hatta mengemukakan bahwa politik luar negeri Indonesia harus ditentukan oleh kepentingan negara yang dijalankan sesuai dengan situasi dan kenyataan yang sedang dihadapi, Suryadinata, (1998).

Politik bebas aktif mempunyai bermacam-macam pengertian atau rumusan yang sesuai dengan cara pandang dari perumus itu sendiri. Dalam hal ini Sumpena Prawirasaaputra merumuskan politik bebas aktif, dimana “bebas” dalam arti Indonesia tidak berpihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, sedangkan aktif berarti didalam menjalankan kebiasaan luar negerinya Indonesia tidak bersikap pasif reaktif atas kejadian-kejadian internasional, melainkan bersikap aktif.

Dalam rangka melaksanakan politik dan hubungan luar negeri, Indonesia menghadapi berbagai masalah internasional. Masalah tersebut harus selalu diamati secara seksama, agar Indonesia dapat ikut membantu mencari pemecahannya demi terciptanya perdamaian yang merupakan salah satu prasyarat bagi berhasilnya pembangunan. Pendekatan-pendekatan dalam rangka mencari penyelesaian terhadap masalah-masalah regional dan internasional tersebut dilakukan melalui upaya bilateral dan multilateral.

Upaya bilateral yang dilakukan antara dua negara diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang timbul di antara kedua negara tersebut, selain itu juga akan diperoleh hasil yang lebih maksimal dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bekerjasama.

Sedangkan upaya multilateral diharapkan dapat lebih meningkatkan dalam memecahkan masalah-masalah regional dan internasional. Kerjasama melalui hubungan multilateral ini tidak selamanya harus berbentuk organisasi internasional, bisa juga hanya didasarkan perjanjian (*treaty*) atau kesepakatan (*agreement*) yang bukan perjanjian untuk membentuk organisasi internasional. Namun untuk lebih mengikat anggotanya, suatu kerjasama harus berbentuk organisasi internasional, karena dalam organisasi internasional struktur organisasinya telah jelas dan lengkap serta dapat melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan.

Wahana-wahana politik luar negeri dalam hubungan multilateral yang berbentuk organisasi internasional global antara lain adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Konferensi Islam, Gerakan Non Blok, OPEC, dan sebagainya.

Keterangan kabinet Natsir pada parlemen bulan September 1952 politik luar negeri Indonesia dari segi pertentangan amerika serikat dan soviet, antar lain disebutkan: antara dua kekuasaan yang telah timbul muncul persaingan atas dasar perbedaan ideologi dan haluan yang semakin meruncing. Kedua belah pihak mencari kawan sekutu, membentuk blok barat dan blok timur. Dengan demikian pertentangan paham makin meluas dan mendalam. Sehingga menimbulkan perang dingin dan dikuatirkan sewaktu-waktu menimbulkan perang di daerah-daerah perbatasan antara dua pengaruh kekuasaan itu. Dalam keadaan yang berbahaya itu Indonesia telah memutuskan politik luar negeri yang bebas. Dan menjalankan politik luar negeri yang bebas, kepentingan rakyat lah yang menjadi pedomannya, disamping itu pemerintah akan berusaha membantu tiap-tiap usaha untuk mengembalikan perdamaian dunia, tanpa politik oportunistis yang hanya memperhatikan untung dan ruginya cita-cita leluhur.

Kabinet Wilopo merupakan kabinet ketiga pada periode Demokrasi Liberal di Indonesia. Kabinet tersebut dihadapkan pada persoalan di bidang ekonomi, politik, perburuhan serta pertahanan dan keamanan yang harus segera diselesaikan. Di bidang ekonomi, persoalan muncul yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang tidak stabil, terutama setelah berakhirnya perang Korea. Karena antara bulan Februari 1951 dan September 1952, harga karet ekspor nasional turun 71%. Hal tersebut berdampak pada jumlah pendapatan

negara. Karena pendapatan utama negara waktu itu berasal dari hasil ekspor dan impor, Ricklefs,(2009).

Permasalahan di bidang politik ditandai dengan keinginan dari berbagai lapisan masyarakat untuk menyelenggarakan pemilihan umum, hal tersebut dapat dipahami bahwa mereka yang berada di parlemen bukan hasil dari pemilihan langsung oleh rakyat. Program kerja pada kabinet sebelumnya mencantumkan pemilihan umum sebagai program utama kabinet, akan tetapi belum ada yang dapat merealisasikannya. Maka dari itu, Kabinet Wilopo menempatkan persiapan penyelenggaraan pemilu sebagai program utama yang harus direalisasikan. Pada tanggal 1 April 1953 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu akhirnya berhasil diselesaikan dengan menghasilkan UU No. 7 tahun 1953 dan disahkan pada tanggal 4 April 1953 (Wilopo, 1976).

Kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri juga menjadi perhatian khusus Kabinet Wilopo yaitu untuk memperbaiki citra Indonesia dimata dunia terutama setelah disepakatinya kerjasama bantuan militer dengan Amerika Serikat yaitu *Mutual Security Act* (MSA). Kerjasama tersebut dianggap sebagai salah satu sikap memihaknya Indonesia terhadap salah satu blok yang sedang berselisih pada waktu itu. Adapun Soebagijo dkk (1979) mengemukakan bahwa salah satu program politik luar negeri yang tertera dalam Program Kabinet Wilopo yaitu “mengisi politik luar negeri yang bebas dengan aktifitas yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa- bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia.

Persoalan di bidang pertahanan dan keamanan, ditandai dengan tidak harmonisnya hubungan sipil dan militer, puncaknya terjadi pada peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa tersebut merupakan konflik elit politik dalam perebutan yurisdiksional antara parlemen dengan Kementrian Pertahanan, yang secara garis besar memuat mengenai sikap anti-Parlemen (Compton,1992). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya mosi tidak percaya dari Kol. Bambang Supeno terhadap kebijakan menteri pertahanan dan pimpinan Angkatan Darat tentang pengurangan personil tentara. Kemudian mosi tersebut dibahas dan diperdebatkan di dalam parlemen (Ricklefs,2009). Perdebatan tersebut memunculkan reaksi dari pimpinan Angkatan Darat yang dianggap sebagai bentuk intervensi pihak sipil terhadap permasalahan internal militer (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010).

Indonesia sebagai negara yang mencintai perdamaian tentunya harus turut berperan aktif dalam menjaga perdamaian di dunia. Penulis merasa perlu untuk mengkaji peran-peran Inonesia untuk menjaga perdamaian, salah satunya dengan membahas mengenai peran-peran Indonesia dalam menyelesaikan masalah regional dan internasional. Selain itu, penulis juga merasa perlu untuk membandingkan kebijakan Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja dan Ali Alatas terhadap organisasi regional dan internasional di dunia. Setiap Menteri Luar Negeri di era Orde Baru memiliki dinamika-dinamika tersendiri dalam menjalankan tugasnya. Keadaan politik di dunia, kepentingan dalam negeri, serta kepribadian dari Menteri Luar Negeri itu sendiri yang menjadikan suatu periode dalam kepemimpinan mereka menjadi unik. Maka, peneliti juga akan menggali mengenai karakteristik dari ketiga Menteri Luar Negeri dalam menjalankan jabatannya. Sudah banyak karya tulis ilmiah yang peneliti temukan mengenai

Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja dan Ali Alatas atas jasanya bagi Indonesia. Namun penulis belum menemukan buku atau karya tulis ilmiah yang membandingkan ketiga tokoh tersebut, baik dalam hal kebijakan maupun dalam upaya-upaya ketiga tokoh dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Oleh karena itu, penulis memilih untuk membandingkan tokoh Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja dan Ali Alatas sebagai Menteri Luar Negeri. Sehingga penulis berharap bahwa karya tulis ilmiah ini dapat melengkapi kajian-kajian terdahulu, khususnya mengenai ketiga tokoh dan umumnya mengenai perkembangan politik luar negeri Indonesia. Dari berbagai pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji **“Implementasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif di Indonesia Pada Masa Kabinet Wilopo dan Upaya Melawan Gerakan Sparatisme”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan kabinet wilopo dalam politik luar negeri bebas aktif?
2. Bagaimanakah peranan kabinet wilopo dalam upaya melawan Gerakan sparatisme?

1.3 Tujuan penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir ilmiah dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan yang sedang diteliti yakni Implementasi politik luar negeri bebas aktif di Indonesia pada masa kabinet wilopo dan upaya melawan Gerakan sparatisme. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi politik luar negeri bebas aktif di Indonesia pada masa kabinet wilopo.

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui Bagaimana peranan kabinet wilopo dalam politik luar negeri bebas aktif
2. Untuk mengetahui Bagaimana peranan kabinet wilopo dalam upaya melawan Gerakan sparatisme.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini di lakukan tidak terlepas dari beberapa hal yang bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi ilmu pengetahuan. Secara umum manfaat penelitian meliputi:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Implementasi politik luar negeri bebas aktif di Indonesia pada masa kabinet wilopo dan upaya melawan Gerakan sparatisme.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Peneliti

Menambah wawasan peneliti atau memperluas cara berpikir mengenai wacana nilai pendidikan tentang peranan kabinet Wilopo dalam politik luar negeri bebas aktif dan peranan dalam upaya melawan gerakan sparatisme

1.4.2.2 Bagi Pembaca

Dapat memberikan gambaran mengenai Implementasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif di Indonesia Pada Masa Kabinet Wilopo Dan Upaya Melawan Gerakan Sparatisme.

1.5 Penjelasan Konsep

Menurut Bahari (2008) Mengatakan bahwa Konsep adalah suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang Sama. Orang yang mempunyai konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang di hadapi, sehingga objek-objek di tempatkan dalam golongan. Objek-objek di hadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep sendiripun dapat di lambangkan dalam bentuk suatu kata.

Untuk menghindari terjadinya penafsiran dan dugaan yang salah terhadap penelitian ini yang berjudul “Implementasi politik luar negeri bebas aktif di Indonesia pada masa kabinet wilopo dan upaya melawan gerakan sparatisme”. Maka Akan menjelaskan beberapa konsep sebagai berikut:

1.5.1 Implementasi

Menurut Harsono,(2002). Implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan tersebut ke dalam tindakan kebijakan politik dalam pembangunan Kebijakan administrasi dalam rangka meningkatkan program.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi pelaksanaan; penerapan: pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu.

Jadi Implementasi dimaksudkan sebagai tindakan individu publik yang diarahkan pada tujuan serta ditetapkan dalam keputusan dan memastikan terlaksananya dan tercapainya suatu kebijakan serat memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Sehingga dapat tercapainya sebuah kebijakan yang memeberikan hasil terhadap tindakan- tindakan individu publik dan swasta.

Berdasarkan pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan, implementasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

1.5.2 Politik

Menurut Mariam Budiardjo (2008), Politik adalah kekuasaan, kekuatan seluruh jaringan Lembaga-lembaga yang mempunyai kaitan dengan otoritas. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapata diterima dengan baik oleh Sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan Bersama yang lebih baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Politik artinya pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan, dasar pemerintahan, bersekolah di akademi, segala urusan dan tindakan, kebijakan siasat, dan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain dalam dan luar negeri kedua negara itu bekerjasama dalam bidang ekonomi, kebudayaan, partai dan organisasi. Cara bertindak dalam menghadapi atau mengenai suatu masalah kebijakan dagang dan bahasa nasional.

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli diatas konsep politik menurut penulis dapat disimpulkan bahwa politik adalah segala sesuatu yang menyangkut kekuasaan dalam mengatur kepentingan dan kebaikan rakyat secara keseluruhan.

1.5.3 Politik Bebas Aktif

Menurut Mochtar Kusumaatmadja (1983), yang berpendapat bahwa arti kata “Bebas” dalam konsep politik bebas aktif adalah bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Sedangkan arti kata “Aktif” adalah dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersikap pasif-reaktif atas kejadian yang terjadi di dunia internasional, melainkan bersifat aktif. Atas dasar politik luar negeri yang bebas aktif itu, Indonesia mendudukkan dirinya sebagai subjek dalam hubungan luar negerinya dan tidak sebagai objek, sehingga Indonesia tidak dapat dikendalikan oleh haluan politik negara lain yang berdasarkan pada kepentingan-kepentingan nasional negara lain itu sendiri.

Tokoh lain yang memberikan pandangannya tentang politik bebas aktif adalah Adam Malik. Berikut pandangan Adam Malik mengenai konsep politik bebas aktif:

Menurut pandangan Adam Malik (1979), “Bebas” dimaksudkan bahwa Indonesia mempunyai jalan atau pendirian sendiri dalam menghadapi persoalan-persoalan internasional, dan dengan “aktif” dimaksudkan bahwa Indonesia akan berusaha dengan sekuat-kuatnya untuk memelihara perdamaian dan berusaha pula meredakan pertentangan dunia, bersama-sama dengan negara lain. Jadi sama sekali tidaklah sama artinya dengan politik “netral”, sebab netral pada dasarnya mengandung unsur ke-pasif-a.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia arti bebas aktif adalah sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak terikat oleh suatu ideologi, tidak masuk Blok negara asing tertentu dan dengan aktif ikut mengambil prakarsa dalam mengembangkan persahabatan dan kerja sama internasional.

1.5.4 Kabinet Wilopo

Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga setelah pembubaran Negara Republik Indonesia serikat yang bertugas pada masa bakti 3 April 1952 hingga 30 juli 1953. Kabinet Wilopo didemisionerkan berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1953 tertanggal 3 Juli 1953. Wilopo memiliki sejarah panjang dalam dunia politik Indonesia. Wilopo berperan aktif demi kemajuan bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka. Masa pergerakan, Wilopo aktif dalam partai dan beberapa organisasi yang punya tujuan untuk memerdekakan Indonesia. Setelah Indonesia Merdeka, Wilopo menjabat beberapa kedudukan penting dalam pemerintahan,

hingga pada masa demokrasi parlementer Wilopo menjabat sebagai Perdana Menteri (1952-1953).

1.5.5 Gerakan Sparatisme

Sparatisme adalah sebuah paham, sedangkan separatis adalah orang (golongan) yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan; golongan (bangsa) untuk mendapatkan dukungan. Jadi orang yang melakukan separatisme adalah atau disebut juga dengan separatis.

Menurut Abdul Qadir Djaelani (2001), Speratis adalah suatu gerakan yang bersifat mengacau dan menghancurkan yang di lakukan oleh gerombolan pengacau yang bertujuan untuk memisahkan diri dari ikatan suatu negara.

Spartisme adalah gerakan yang tentunya memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari suatu wilayah atau negara. Hal ini dilakukan untuk membuat suatu wilayah atau golongan merdeka dan mendapatkan kedaulatannya sendiri sebagai negara baru.

BAB II

LANDASAN TEORI

Penulisan karya ilmiah dalam bidang Pendidikan tinggi tidak terlepas dari sumber teoritis yang di gunakan karena mempunyai peranan yang penting sebagai landasan penulis untuk memecahkan permasalahan yang di teliti. Sehingga dalam pengkajian tentang implementasi politik luar negeri bebas aktif di Indonesia pada masa cabinet wilopo dan upaya melawan Gerakan sparatisme sangat memerlukan sumber teoritis.

Berdasarkan hal tersebut, maka literatur yang memadai dan sepadan diharapkan dapat melandasi suatu hal penelitian sehingga dapat memberikan subah penafsiran yang lebih jelas tentang permasalahan yang diungkapkan, serta dapat memberikan hasil penelitian yang dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya.

Perumusan hasil penelitian bertujuan agar mendapat suatu hal yang sejalan dengan rumusan permasalahan, maka di kemukakan beberapa landasan teori yang mendasari penelitian lebih lanjut untuk memberikan penegasan dalam penggunaan metode yang mendukung dan pencapaian tujuan yaitu pemecahan masalah penelitian. Beberapa landasan teori yang di pandang relevan adalah diantaranya adalah:

2.1 Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky Usman (2004), mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”

Menurut Syauckani dkk (2004), Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Dari beberapa pendapat para ahli tentang implementasi, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi menurut penulis sendiri merupakan suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Implementasi juga sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan politik luar negeri bebas aktif di Indonesia pada masa kabinet wilopo.

2.2 Politik

Politik berasal dari Bahasa Yunani “polis” yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti berkembang menjadi “Politics” yang berarti warga negara, Politicia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politik yang berarti pemerunahan negara dan politikus berarti kewarganegara. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam

suatu system politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari system itu untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik merupakan cara atau upaya untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki.

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lainnya berwujud proses pembuatan keputusan. Khususnya dalam negara, berdasarkan klasik Ari Toteles. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan Bersama.

Menurut Kartini Kartono (1996), Bahwa politik adalah sebagai aktivitas atau perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah dan berlaku di tengah masyarakat. Dengan demikian aturan-aturan dengan keputusan yang tadi ditetapkan serta dilaksanakan oleh pemerintah ditengah keadaan sosial yang dipengaruhi oleh kemajemukan/kebinekaan, perbedaan kontroversi, ketegangan dan konflik oleh karena itu perlunya di tegakkan tata tertib sehingga dapat diharapkan dengan penegakkan tata tertib tersebut tidak akan terjadi perpecahan antara masyarakat.

Menurut Cecep Darmawan (1998), Politik adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan negara, termasuk didalamnya kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan maupun pembagian dan pengalokasian nilai-nilai didalam masyarakat yang bersangkutan. Pengertian politik juga dapat di lihat dan diklarifikasi dalam ranah-ranah seperti; (1) politik dalam arti kepentingan, politik adalah ilmu yang menjelaskan tentang kepentingan, baik dalam konteks individu, kelompok, cara meraih, merebut, atau memperhatikan kepentingan perorangan maupun kelompok. (2) politik dalam arti kebijakan, politik adalah aturan main

dalam mengurus masalah kebijakan-kebijakan dalam mempertahankan kepentingan yang dapat diterima oleh berbagai kalangan, (3) politik dalam arti Institusional, politik adalah ilmu yang mempelajari tentang Lembaga-lembaga politik seperti negara, pemerintah, DPR yang semuanya terkait dengan kajian ilmu politik.

Dari beberapa pendapat para ahli tentang politik, maka dapat di simpulkan bahwa politik menurut penulis sendiri merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik dan untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan, sehingga pelaksanaan politik dalam suatu negara akan selalu mengalami perubahan, perubahan yang terjadi tanpa rencana, sehingga perubahan politik bagi negara biasa menuju pada situasi negara yang lebih baik dari pada sebelumnya yang bersifat progresif.

2.3 Politik Bebas Aktif

Menurut Wijaya A.W (1940), merumuskan: Bebas berarti tidak terikat oleh satu ideologi atau oleh satu politik negara asing atau blok negara tertentu, atau negara adikuasa (super power). Aktif artinya dengan sumbangan realistis giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerja sama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain.

Menurut Mukhtar Kusumaatmadja (1983), Politik bebas aktif adalah: sebuah politik yang tidak memihak kepada suatu kekuatan mana pun yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan Pancasila, di mana dengan tidak memihak tersebut

negara tetap aktif melakukan hubungan internasional dan kebijakan luar negeri, negara tetap ikut serta secara tanggap dalam segala permasalahan dunia yang ada.

Menurut B.A. Urbani, pengertian politik bebas aktif berasal dari kata pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945, “supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas”. Ini berarti, Indonesia bebas mengemukakan pendapat dan mengambil sikap terhadap semua masalah internasional sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tanpa memihak blok mana pun.

Dengan berlandaskan politik luar negeri, Indonesia telah bergabung dalam misi perdamaian dunia. Politik luar negeri Indonesia, memegang prinsip bebas aktif.

1. Perdamain Dunia

Terdapat tiga nilai yang dianut dalam politik luar negeri Indonesia. Pertama, politik luar negeri Indonesia ditujukan untuk mewujudkan kepentingan nasional khususnya, kepentingan pembangunan.

Kedua, politik luar negeri Indonesia ditujukan untuk menegaskan kembali bahwa Indonesia memegang prinsip bebas aktif yang tidak berpihak pada imperialisme, maupun kolonialisme.

Ketiga, politik luar negeri merepresentasikan bahwa Indonesia turut ambil bagian dalam upaya ketertiban dunia. Ketertiban dunia tersebut salah satunya adalah, stabilitas di wilayah Asia Tenggara sekaligus meningkatkan kemampuan dalam pembangunan nasional.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, politik luar negeri Indonesia memegang prinsip bebas aktif.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja dalam materi berjudul Peranan Indonesia dalam Rangka Turut Menciptakan Perdamaian Dunia, bebas berarti, Indonesia tidak memihak pada nilai-nilai di luar nilai yang diajarkan dalam Pancasila, sebagai ideologi bangsa.

Sementara aktif berarti, Indonesia bersikap aktif dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Konsep bebas aktif berlandaskan pada Pancasila yang juga tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan hubungan luar negeri Indonesia perlu berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut di antaranya, Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan. Dalam pembukaan UUD 1945, dengan jelas mencantumkan beberapa ketentuan. Ketentuan tersebut dijadikan sebagai dasar pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang terbagi menjadi empat alinea.

- Alinea pertama, Indonesia anti kolonialisme dan berupaya untuk menghapuskan setiap penjajahan.
- Alinea kedua, perjuangan bangsa Indonesia ditujukan untuk mewujudkan kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, dan keadilan. Dengan mewujudkan hal-hal tersebut, maka Indonesia dapat mengembangkan hubungan antar bangsa.
- Alinea ketiga, bangsa Indonesia meyakini bahwa saling tolong menolong antar bangsa mampu mewujudkan kemerdekaan bangsa.
- Alinea keempat, terdapat dua tujuan yang sifatnya internal dan eksternal. Tujuan internal di antaranya, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Kemudian, memajukan kesejahteraan umum, dan

mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara tujuan eksternal yaitu, melaksanakan ketertiban dunia.

2. Kerja sama antar Dunia pada masa Kabinet Wilopo

Memasuki awal tahun 1953, Indonesia kembali melakukan perjanjian perdagangan dengan negara kawasan Asia Selatan yakni Negara India yakni pada tanggal 30 Januari 1953 di *New Delhi*. Perjanjian yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan India merupakan sebuah perjanjian perdagangan, yang dimana dalam perjanjian perdagangan antara kedua negara tersebut, adapun barang-barang yang akan di ekspor dan di impor oleh kedua negara tersebut diantaranya adalah:

- a. Ekspor dari India antara lain: pembuat tembakau, benang kapas, kipas angin, dinamo (motor listrik), minyak nabati, karet ban dan tabung.
- b. Impor dari Indonesia antara lain: timah, minyak kelapa, karet, garam, rotan, dan damar.

Pada masa Kabinet Wilopo, pemerintah Indonesia tidak hanya melakukan perjanjian ekonomi dengan India saja. Akan tetapi dengan Pakistan juga pemerintah Indonesia lakukan. Perjanjian ekonomi antara Indonesia dengan Pakistan merupakan perwujudan dari perjanjian persahabatan kedua negara tersebut, khususnya Indonesia pada masa kabinet Natsir. Perjanjian itu sendiri ditanda tangani di Karachi pada tanggal 7 Februari 1953. Sama halnya perjanjian yang dilakukan dengan pemerintah India, dalam perjanjian ekonomi dengan pemerintah Pakistan Ekspor dan Impor barang merupakan hal pokok dari perjanjian ekonomi kedua negara tersebut.

Politik bebas aktif mengarah kepentingan pada:

1. Nasionalisme

Menurut Hans Kohn (1955), Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat, bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Perasaan sangat mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada disepanjang sejarah dengan kekuatan yang berbeda-beda. Kesetiaan tertinggi bisa di gambarkan dengan rasa kesetiaan, pengabdian, mempertahankan corak asli bangsanya, keyakinan, semangat, persatuan dan sesatuan, kasih sayang, dan bangga terhadap bangsanya dan menjaga apa yang telah diperjuangkan.

1. Negara maju

Negara maju adalah yang mengalami perkembangan ekonomi yang baik melalui kebijakan dan perwakilan pemerintah yang mengedepankan kepentingan publik tanpa adanya korupsi.

Menurut Ahmad (2012) Negara maju adalah Negara yang telah memaksimalkan sektor industri dalam berbagai bidang. Diri khas Negara maju, dalam pengertian ini menjalankan sistem perekonomian pasar.

Kesimpulan dari berbagai pendapat para ahli, politik bebas aktif dibagi menjadi dua kata. Bebas dan aktif. Bebas berarti Bangsa Indonesia sebagai negara yang berdaulat bebas menentukan keinginannya sendiri, mengatur negaranya, dan dalam hubungannya dengan negara lain atau hubungan internasional. Sementara aktif, dapat berarti ikut serta aktif dalam berbagai hubungan internasional, atau dalam pembukaan UUD 1945 dikatakan sebagai ikut serta melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

2.4 Kabinet Wilopo

Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat yang bertugas pada masa bakti 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Kabinet Wilopo didemisionerkan berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1953 tertanggal 3 Juli 1953. Wilopo memiliki sejarah panjang dalam dunia politik Indonesia. Wilopo berperan aktif demi kemajuan bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka. Masa pergerakan, Wilopo aktif dalam partai dan beberapa organisasi yang punya tujuan untuk memerdekakan Indonesia. Setelah Indonesia Merdeka, Wilopo menjabat beberapa kedudukan penting dalam pemerintahan, hingga pada masa demokrasi parlementer Wilopo menjabat sebagai Perdana Menteri (1952-1953).

Pada 19 maret 1952 presiden menunjuk Mr. Wilopo dari PNI sebagai formatir kabinet yang baru. Selain berperan aktif dalam PNI, Wilopo juga seorang pendidik dan kolumnis. Lulusan RHS ini, lahir dan dibesarkan di Purworejo, Jawa Tengah. Pada 30 Maret Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya yang terdiri atas PNI dan Masyumi masing-masing mendapat jatah 4 orang, PSI 2 orang, Partai Khatolik Republik Indonesia (PKRI), Parkindo, Parindra, Partai buruh dan PSII masing-masing 1 orang dan 3 orang golongan tidak berpartai. Dalam menentukan susunan personalia kabinetnya, Wilopo mengusahakan adanya suatu tim yang padu sebagai zaken kabinet, sehingga dapat secara bulat mendukung kebijakan pemerintah. Kabinet Wilopo merupakan kabinet ketiga pada periode demokrasi liberal di Indonesia. Kabinet ini menghadapi banyak tantangan dan

hambatan dalam menjalankan program kerjanya. Keadaan ini diperparah dengan banyaknya peristiwa-peristiwa yang mengancam keutuhan negara, diantaranya peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morawa. Pada tahun 1953 Kabinet ini demisioner.

2.4.1 Program Kerja Kabinet Wilopo

Program kerja yang diusung kabinet ini juga tidak jauh berbeda dengan program kerja dua kabinet sebelumnya. Wilopo hanya melengkapi dan menyempurnakan beberapa hal yang dianggap penting untuk dimasukkan dalam program kerjanya, hal ini mengingat bahwa Indonesia yang baru saja merdeka pada saat itu memiliki masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu periode kabinet saja. Program kerja yang dijadikan landasan kabinet baru ini ialah sama seperti yang disetujui kedua formatir sebelumnya, Prawoto dan Sidik. Hanya ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan dimatangkan sebelum diajukan ke Presiden. berikut merupakan Program Kerja yang telah diajukan oleh Kabinet Wilopo dan diterima oleh Presiden:

1. Organisasi Negara
 - a. Melaksanakan pemilihan umum untuk konstituante dan dewan– dewan daerah.
 - b. Menjelaskan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah
 - c. Menyederhanakan organisasi pemerintahan pusat.
2. Kemakmuran
 - a. Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional terutama bahan makanan rakyat.

b. Melanjutkan usaha perubahan agrarian.

3. Keamanan

Menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum. Menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara serta memperkembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman.

4. Perburuhan

Memperlengkapi perundang-undangan perburuhan untuk meningkatkan derajat kaum buruh guna menjamin proses produksi nasional.

5. Pendidikan dan Pengajaran

Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran.

6. Luar Negeri

- a. Mengisi politik luar negeri yang bebas dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia.
- b. Menyelesaikan penyelenggaraan perhubungan Indonesia-Belanda atas dasar Unie Statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional biasa yang menghilangkan hasil-hasil KMB yang merugikan rakyat dan negara.
- c. Meneruskan perjuangan memasukan Irian Barat dalam Wilayah Indonesia secepat-cepatnya.

Kebijakan ini masih terus menjalani proses perundingan antara Perdana Menteri Wilopo dan Presiden Soekarno. Mengingat apabila Wilopo yang duduk

pula sebagai menteri Luar Negeri maka akan banyak persoalan pula yang muncul. Pada 3 April 1952, Mangunsarkoro juru bicara PNI menerangkan bahwa semalam sebelumnya telah terjadi perundingan antara Perdana Menteri dan Presiden. Akhirnya Presiden menyetujui diangkatnya Mukarto sebagai Menteri Luar Negeri. Duduknya Mukarto dalam kabinet merupakan elemen penting dalam susunan kabinet. Akhirnya susunan kabinet Wilopo kembali seperti draft susunan yang diajukan pada Presiden awalnya. Kabinet Wilopo resmi dilantik pada 3 April 1952 dengan susunan PNI dan Masyumi masing-masing empat orang, PSI dua orang, PKRI, Parkindo, Parindra, Partai Buruh dan PSII, masing-masing satu orang dan tiga orang tak berpartai lainnya. Wilopo sendiri masih menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri ad Interim sejak 3 April 1952 sampai 29 April 1952. Hal ini tercantum dalam keputusan Presiden Republik Indonesia no. 99 Tahun 1952.

2.4.2 Kegagalan Program Kerja Kabinet Wilopo

Kegagalan program kerja dalam kabinet Wilopo disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, masa kerja kabinet Wilopo terbilang cukup singkat yakni mulai 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953, sehingga waktu yang ada untuk merealisasikan semua program kerja yang cukup banyak seperti disebutkan diatas tidak mencukupi. Sebuah program kerja tentunya tidak bisa langsung terlaksana, melainkan harus melalui beberapa tahapan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan masalah-masalah yang terjadi selama kabinet Wilopo berlangsung mengakibatkan kabinet ini harus mengakhiri masa kerjanya dalam waktu kurang lebih satu tahun.

Kedua, ‘musuh’ yang dihadapi bangsa Indonesia kala berlangsungnya kabinet ini cukup berat, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, dari dalam kabinet juga muncul pertentangan antara petinggi-petinggi partai politik, ditambah lagi dengan munculnya pemberontakan dari daerah-daerah yang merasa tidak mendapatkan haknya dari pemerintah pusat. Sedangkan dari luar negeri, pertikaian dengan negeri Belanda atas masalah Irian Barat juga menyulitkan Indonesia meraih kembali kedaulatan atas Irian Barat agar masuk wilayah Indonesia. Sengketa ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, karena kekuatan dari pihak Belanda yang sangat kuat, bahkan berbagai perjanjian yang pernah diupayakan tidak mampu menyelesaikan kasus Irian Barat.

Ketiga, dalam tujuan mencapai kemakmuran rakyat, agaknya juga menemui hambatan karena kondisi perekonomian negara sendiri saat itu juga tengah mengalami penurunan, terjadi banyak kasus korupsi, serta terjadinya inflasi karena tingginya harga barang import dan rendahnya barang produksi untuk ekspor, yang menyebabkan defisit kas negara.

Keempat, masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia setelah kependudukan Jepang dan Revolusi sangatlah besar. Perkebunan-perkebunan dan instalasi industri diseluruh penjuru negeri rusak berat. Mungkin yang paling penting ialah bahwa jumlah penduduk meningkat tajam. Produksi pangan meningkat namun tidak mencukupi kebutuhan yang ada. Terjadinya berbagai kasus ledakan penduduk yang signifikan membuat keadaan semakin kacau. Di Jawa, produksi beras perkapita sedikit menurun dari Tahun 1950-1960.

Maka sejumlah besar import makanan masih diperlukan. Pertanian banyak menyerap tenaga kerja baru dengan membagi pekerjaan kepada sejumlah buruh yang jumlahnya semakin hari semakin meningkat. Tetapi, dengan menurunnya jumlah lahan yang dimiliki banyak keluarga petani tidak lagi memiliki lahan yang cukup untuk menafkahi hidup mereka dan harus mencari pendapatan mereka dengan menjadi buruh upahan. Karena di daerah desa tanah sudah menjadi sempit, maka terjadilah urbanisasi untuk mencari penghidupan yang lebih layak.

Keadaan ekonomi menjadi semakin memburuk dengan berakhirnya Perang Korea. Antara bulan Februari 1951 dan September 1952, harga karet, ekspor nasional yang terpenting turun 71%. Hal ini juga mengakibatkan pemasukan bagi uang pemerintah merosot tajam. Upaya untuk memperbaiki neraca perdagangan yang dianggap tidak menguntungkan serta keluarnya cadangan emas dan devisa maka pemerintah mengenakan bea tambahan sebesar 100-200% terhadap impor barang-barang mewah dan mengurangi pengeluaran. Langkah tersebut memperbaiki dampak yang paling buruk dari krisis ekonomi, tetapi menimbulkan akibat-akibat yang paling buruk terhadap para pendukung utama PNI. Masyumi mendukung kebijakan itu, sehingga meningkatkan ketegangan antara PNI dengan Masyumi.

2.4.3 Berakhirnya Kabinet Wilopo

Kabinet Wilopo selama periode pemerintahannya telah banyak melakukan kebijakan-kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang ada pada saat itu. Program kerja yang dilaksanakan pemerintahan Kabinet Wilopo secara tidak langsung juga membawa kemajuan yang pesat dalam beberapa bidang bagi

Indonesia. Seperti halnya kabinet-kabinet sebelumnya, sepak terjang pemerintahan kabinet ini tidak berjalan semulus yang dibayangkan. Banyak peristiwa yang terjadi antara pada masa itu juga turut mendorong jatuhnya Kabinet Wilopo. Beberapa peristiwa yang memiliki peran besar dalam jatuhnya kabinet adalah sebagai berikut.

a. Peristiwa 17 Oktober 1952

Pada masa Kabinet Wilopo bertugas, pemerintah telah dihadapkan pada berbagai masalah negara. Baik itu masalah dalam negeri maupun luar negeri. Entah itu masalah ekonomi, sosial, politik, ataupun keamanan. Masalah atau kasus-kasus tersebut tentunya berdampak langsung bagi keadaan pemerintah maupun negara pada saat itu, seperti peristiwa 17 Oktober 1952 ini. Peristiwa ini mungkin menjadi salah satu kasus sulit yang dihadapi pemerintah Kabinet Wilopo.

b. Peristiwa Tanjung Morawa

Tanjung Morawa adalah sebuah tanah perkebunan yang cukup luas yang berada di Sumatra Timur. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda tanah tersebut disewakan kepada Deli Planters Vereniging (DPV). Sejak masa pendudukan Jepang sampai masa Revolusi fisik tanah tersebut dibiarkan terbengkalai dan tidak digarap. Kemudian tanah perkebunan tersebut akhirnya diambil alih dan dimanfaatkan oleh penduduk setempat.

2.5 Gerakan Sparatisme

Separatisme adalah suatu paham atau gerakan untuk memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri. Separatism merupakan gerakan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk menyempal atau memisahkan diri dari negara lama yang sudah ada guna membentuk atau mendirikan negara sendiri yang merdeka dan berdaulat. Sekelompok masyarakat yang melakukan gerakan separatis dapat berasal dari daerah atau provinsi tertentu, etnik tertentu, atau komunitas tertentu. Hal yang memotivasi mereka untuk memisahkan diri dan mendirikan negara tersendiri dapat berupa kesamaan nasib, visi, misi, dan sebagainya. Perasaan kecewa dan tidak puas akibat berbagai perlakuan diskriminatif dan pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam yang timpang dari pemerintah pusat juga dapat mendorong sekelompok masyarakat untuk melakukan separatisme.

Separatisme merupakan gerakan yang berbahaya. Jika tidak diatasi dengan kebijakan yang tepat, separatisme dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa dan negara, sebagaimana yang terjadi dan dialami oleh Uni Soviet dan Yugoslavia pada awal tahun 1990-an. Separatisme dapat diantisipasi serta dicegah dan ditanggulangi dengan cara memberikan perlakuan yang adil dan merata dalam segala hal kepada semua etnik, suku, dan masyarakat di setiap provinsi. Gerakan ini muncul dari berbagai aspek diantaranya adalah :

1. Ketidakpuasaan akan kinerja pemerintahan maka munculah ide-ide untuk membentuk suatu gerakan yang memiliki misi dan visi yang berbeda dalam menyaingi keadaan yang sudah ada dalam birokrasi dan tatanan yang sudah ada sebelumnya.
2. Kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya yang dalam pemikiran sejumlah kelompok tidak wajar, maka cenderung mereka ingin bebas dan keluar dari

aturan itu dan memilih membrontak dari kebijakan yang ada dan ingin merdeka dengan caranya sendiri.

3. Pemahaman terhadap keyakinan dan ini cenderung mengarah pada paham separatisme, dan merusak tatanan nilai dan moral yang ada, serta dapat menimbulkan perpecahan

Masalah separatisme atau disintegrasi nasional sudah menjadi pembahasan penting di beberapa negara di seluruh dunia. Supaya dapat memahami gerakan separatisme, ada tiga unsur yang harus dipertimbangkan, yaitu penyebab, proses, dan hasilnya. Penyebab separatisme sering tergantung kepada sejarah, ketidak-adilan atau keragaman identitas.³⁸ Proses separatisme adalah sebuah proses yang sulit, dan sering memunculkan konflik yang hampir mirip dengan perang sipil. Melalui proses-proses ini, gerakan separatisme akhirnya bisa mencapai keberhasilan atau bahkan kegagalan.

Menurut Sujatmiko Iwan G (2001), Ada dua variabel dominan yang sangat mempengaruhi keberhasilan gerakan separatisme, yang pertama kekuasaan baik dalam maupun luar negeri, dan yang kedua dukungan internasional.

2.1.5.1 Penyebab terjadinya Separatisme

Penyebab separatisme adalah konflik vertikal dan konflik horizontal yang terjadi dalam suatu negara. Kedua konflik tersebut menjadi faktor penyebab separatisme yang paling utama.

Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara rakyat dengan pemerintah. Sedangkan konflik horizontal merupakan konflik antara rakyat dengan rakyat, kelompok dengan kelompok, yang sederajat.

Separatisme adalah gerakan yang kerap kali terjadi karena faktor ekonomi. Krisis ekonomi dan kemanusiaan menjadi alasan utama terjadinya gerakan separatisme. Ekonomi yang lemah pada suatu negara menyebabkan terjadinya berbagai tindak kejahatan, seperti merampok, mencuri, membunuh, dan sebagainya. Selain itu, penyebab separatisme adalah pemulihan dari krisis ekonomi yang lamban dan berlangsung begitu lama dan tidak efektif. Hal ini bisa menjadi pemicu yang sangat kuat timbulnya gerakan separatisme.

2.5.1 Gerakan separatisme pada masa kabinet wilopo

Jatuhnya kabinet wilopo Kesulitan yang dihadapi Kabinet Wilopo adalah adanya gerakan separatisme di sejumlah daerah, adanya:

- a. peristiwa 17 Oktober 1952 mengenai gerakan sejumlah perwira Angkatan Darat yang menekan Presiden Soekarno agar membubarkan parlemen,
- b. Peristiwa Tanjung Morawa di Sumatra Utara. Peristiwa Tanjung Morawa terjadi karena pemerintah sesuai dengan persetujuan KMB mengizinkan pengusaha asing untuk kembali mengusahakan tanah-tanah perkebunan.

Pada masa Kabinet Sukiman, Mr. Iskaq Cokroadisuryo (menteri dalam negeri) menyetujui dikembalikan tanah Deli Planters Vereenging (DPV) yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan pemiliknya. Namun, selama ditinggalkan oleh pemiliknya, tanah tersebut digarap oleh para petani. Penyerahan kembali tanah tersebut dilaksanakan pada masa Kabinet Wilopo. Polisi pada tanggal 16 Maret 1953 mengusir para penggarap tanah yang tidak memiliki izin. Akibatnya terjadilah bentrokan senjata dan 5 orang petani terbunuh. Peristiwa-peristiwa tersebut mendapatkan sorotan yang tajam dari pers maupun dari parlemen. Sidik Kertapati dari Serikat Tani Indonesia (Sakti) mengajukan mosi tidak percaya

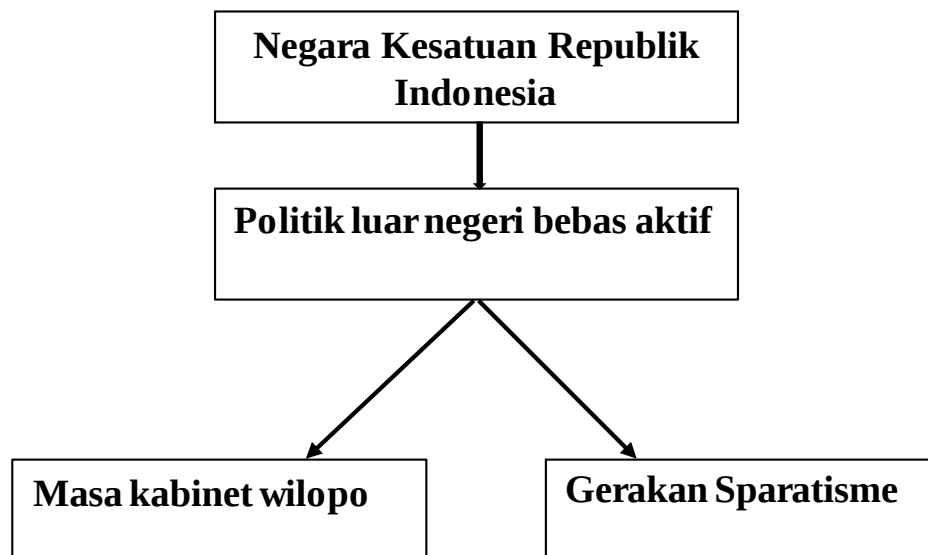
terhadap Kabinet Wilopo. Akhirnya pada tanggal 2 Juni 1953 Wilopo mengembalikan mandat kepada presiden.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, separatisme adalah paham atau gerakan untuk memisahkan diri (mendirikan negara sendiri). Separatisme adalah sebuah paham, sedangkan separatis adalah orang (golongan) yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan; golongan (bangsa) untuk mendapatkan dukungan. Jadi orang yang melakukan separatisme adalah atau disebut juga dengan separatis.

Separatisme adalah gerakan yang tentunya memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari suatu wilayah atau negara. Hal ini dilakukan untuk membuat suatu wilayah atau golongan merdeka dan mendapatkan kedaulatannya sendiri sebagai negara baru.

2.6 Kerangka Berpikir

Menurut Juliansah Noor (2015), Mengatakan Kerangka berpikir merupakan suatu tahapan yang di gunakan oleh peneliti untuk memperjelas proses jalannya suatu penelitian serta arah dan tujuannya. Kerangka berpikir juga merupakan konseptual mengenai bagaimana suatu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah di identifikasikan penting terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka berpikir peneliti harus konsep atau variable penelitiannya serta lebih perinci dan juga menguraikan keterkaitan antara variable tersebut.



Keterangan:

—————> : Artinya garis hubungan antara NKRI dengan Politik Luar Negeri Bebas aktif, Masa Kabinet Wilopo, Gerakan Separatisme.

2.6.1 Penjelasan Kerangka Berpikir

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara merdeka dengan aneka corak keragaman dan warna-warni kebudayaan. NKRI adalah kesatuan wilayah dari sabang Nangroe Aceh Darussalam (NAD) Sampai merauke di Irian Jaya (Papua). Indoensia terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama yang berbeda. Semboyan nasional indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” Yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi satu. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas indoensia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia.

Politik Bebas Aktif adalah sikap indonesia yang mempunyai jalan atau penderian sendiri dalam menghadapi masalah internasional tanpa memihak pada blok barat maupun blok timur serta turut berperan aktif dalam menciptakan

perdamaian dunia. Dengan demikian politik bebas aktif adalah politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan secara aktif dalam upaya perdamaian dunia.

Kabinet Wilopo merupakan Kabinet yang terdiri atas para pakar yang ahli dalam bidangnya. Di pimpin oleh Mr. Wilopo. Adapun program kerjanya adalah sebagai berikut. Pertama, mempersiapkan pemilihan umum. Kedua, berusaha mengembalikan Irian barat ke pangkuan RI. Ketiga, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. Keempat, memperbaharui bidang pendidikan dan pengajaran. Kelima, melaksanakan politik luar negeri.

Kabinet Wilopo banyak mengalami kesulitan dalam mengatasi timbulnya gerakan-gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang akan mengganggu stabilitas politik Indonesia. Ketika kabinet Wilopo berusaha menyelesaikan sengketa tanah perusahaan asing di Sumatera Utara, kebijakan itu ditentang oleh wakil-wakil partai oposisi di DPR sehingga menyebabkan kabinetnya jatuh pada 2 Juni 1953 dalam usia 14 bulan.

Gerakan separatis atau gerakan memisahkan diri yang dilakukan sebuah komunitas dari sebuah bangsa merupakan gejala universal yang sudah cukup lama berkembang pada beberapa negara, gerakan separatis berhasil membentuk sebuah negara baru. Sementara di sebagian besar negara gerakan separatis tak pernah mampu berkembang lebih luas, dan kemudian, berkembang-menjadi. Ganjalan bagi pertumbuhan dan perkembangan demokrasi negara bersangkutan.

Gerakan separatisme pada masa Kabinet Wilopo adalah adanya gerakan separatisme di sejumlah daerah, adanya peristiwa 17 Oktober 1952:

1. Mengenai gerakan sejumlah perwira Angkatan Darat yang menekan Presiden Soekarno agar membubarkan parlemen.
2. Peristiwa Tanjung Morawa di Sumatra Utara. Peristiwa Tanjung Morawa terjadi karena pemerintah sesuai dengan persetujuan KMB mengizinkan pengusaha asing untuk kembali mengusahakan tanah-tanah perkebunan.

2.7 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan berupa dugaan atau jawaban yang bersifat sementara atas pernyataan yang di kemukakan dalam rumusan masalah.

Menurut Juliansah Noor (2015), Hipotesis juga merupakan suatu jawaban duga yang dianggap besar kemungkinannya untuk menjadi jawaban yang benar. Hipotesis adalah pernyataan berupa generalisasi tentative (sementara) tentang suatu masalah yang belum pasti kebenarannya.

Kabinet Wilopo dimisionerkan berdasarkan keputusan presiden RI No 99 Tahun 1953 tertanggal 3 juni 1953. Kabinet wilopo termasuk kabinet zaken yang artinya kabinet yang jajarannya di isi oleh para toko ahli didalam bidangnya dan bukan merupakan representatif dari para politik.

Pada masa kabinet Wilopo yang sangat singkat iya berhasil dalam menjalankan beberapa program kerjanya seperti, melaksanakan pemilihan umum, meningkatkan kemakmuran rakyat dengan melakukan produksi nasional termasuk bahan makanan rakyat, selain itu merevisi perundang-undangan perburuhan,

upaya menciptakan keamanan dalam negeri dengan cara mengeluarkan berbagai kebijakan serta memperbaiki organisasi alat-alat kekuasaan negara serta mengembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman, upaya memperjuangkan Irian barat untuk kembali ke tangan RI, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Dengan bukti antara Indonesia-Belanda berdasar kan asas *unie-statuut*.

Pada masa kabinet Wilopo tidak berjalan mulus seperti kabinet-kabinet sebelumnya iya mengalami kegagalan dan menyebabkan kemundurannya karena terjadi gerakan-gerakan separatisme di beberapa daerah seperti, peristiwa 17 oktober 1952 terjadinya berbagai masalah mulai dari masalah ekonomi, reorganisasi atau profesionalisme tentara, serta adanya campur tangan dari parlemen atas permasalahan militer, terjadi peristiwa tanjung morawa dimana rakyat protes kepada pemerintah yang telah mengerjakan lahan perkebunan kepada para investor asing dengan alasan untuk meningkatkan hasil devisa asing.